

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Masa depan bangsa ini berada di pundak pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya pada Perguruan Tinggi. Kesadaran akan daya saing global yang kian hari makin ketat mengantarkan untuk menemukan sistem pendidikan yang dapat membekali keterampilan kewarganegaraan atau *civic skills* para alumninya adalah kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi pilihan pemerintah untuk menjadi penunjang dalam menaikkan kemampuan, kompetensi, dan keahlian para mahasiswa di Indonesia dalam menghadapi tantangan global di abad 21 ini yang dimana menuntut adanya kemampuan komunikasi dan kerjasama, kemampuan menciptakan dan memperbaharui, serta kemampuan bernalar tinggi dalam menyelesaikan masalah.

Kurikulum KKNI berkali kali direvisi adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam hal mengarungi tantangan global patut diapresiasi. Namun sebaliknya, telah menjadi tanggung jawab bersama untuk mengevaluasi pencapaian dari diterapkannya kurikulum KKNI. Sebab secara konsep output dari dunia pendidikan adalah kesiapan individu dalam kehidupan nyata, yakni menjadi katalisator terwujudnya masyarakat yang damai dan tentram melalui keterampilan intelektual maupun keterampilan partisipasi yang dimilikinya. Namun faktanya, kian hari semakin banyak masalah sosial seperti demonstrasi mahasiswa yang berakhir ricuh, tidak terampilnya dalam penggunaan media sosial sehingga penyebaran hoaks semakin merajalela yang berpotensi menjadi senjata propaganda untuk merangsang radikal terorisme di dunia maya, hingga kedudukan organisasi pemuda kian meredup dalam hal reputasi dalam masyarakat. Hal tersebut dapat disinyalir bahwa *civic skills* belum tumbuh sesuai yang diharapkan dalam diri para mahasiswa hingga alumni dari Perguruan Tinggi.

Dwi Agustina Rahayu, 2019

IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIOANAL INDONESIA (KKNI) DALAM MENINGKATKAN CIVIC SKILLS PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI STKIP PGRI TULUNGAGUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Data yang menunjukkan mengenai permasalahan tentang krisis *civic skills* diantaranya, informasi atau berita yang dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan. Survey Mastel (2017) mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden,

44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Bahkan media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya terkadang ikut terkontaminasi penyebaran hoax. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran informasi/berita hoax, masing-masing sebesar 1,20% (radio), 5% (media cetak) dan 8,70% (televisi).

Penyebaran berita Tidak saja oleh media kini hoax sangat banyak beredar di masyarakat melalui media online. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi chatting (Whatsapp, Line, Telegram) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan Path) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian (Pratama, 2016).

Kecakapan kewarganegaraan (*Civic Skills*) menawarkan mengenai menyelesaikan masalah sosial yang semakin hari semakin mengancam integrasi nasional. Oleh sebab itu, pendidikan di Indonesia terkhusus institusi perguruan tinggi harus menaruh perhatian dalam hal menumbuhkan *civic skills* para mahasiswa agar dapat menjadi kaum milenial yang menaruh harapan besar dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Penerapan kurikulum KKNI dalam perguruan tinggi seyogyanya dapat mencetak alumnus perguruan tinggi yang cakap dan terampil dalam konteks warga negara sebab Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah salah satu rujukan nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumberdaya manusia melalui pencapaian kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran. Membahas keterampilan

Dwi Agustina Rahayu, 2019

IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) DALAM MENINGKATKAN CIVIC SKILLS PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI STKIP PGRI TULUNGAGUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kewarganegaraan dipertegas bahwa *Civic Skills* adalah karakter yang dikembangkan secara psikopedagogis, andragogis dan sosiokultural dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Sumantri & Winataputra, 2017:4). Oleh sebab itu, kemampuan tenaga pengajar dalam mengembangkan kurikulum (*curriculum developer*) sangatlah dibutuhkan agar dapat menumbuhkan *civic skills* dalam diri para mahasiswa. Sebab, secara konsep untuk menjalankan peranan dan fungsi sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) harus memiliki karakter, salah satunya adalah *civic skills* (Wahab & Sapriya, 2011:31).

Komponen penting yang hendak dikembangkan dalam mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu warga negara yang cerdas (memiliki pengetahuan kewarganegaraan), terampil (berpikir kritis dan berpartisipasi), dan berkarakter (loyal kepada bangsa dan negara, memiliki kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945). Pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan merupakan basis bagi terbentuknya karakter kewarganegaraan. Karakter kewarganegaraan berisikan sifat-sifat yang melekat pada diri setiap warga negara dalam melakukan perannya sebagai warga negara, hal ini akan terbentuk ketika pada dirinya telah terbentuk pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan (Cholisin, 2003: 2).

Pada hakikatnya pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan Pasal 3 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga pendidikan berperan untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa dengan mengintegrasikan pemikiran dan realisasi sikap dalam kehidupan.

Seseorang yang ingin sukses dan menjadi pemenang dalam kehidupan perlu menempatkan pendidikan sebagai pilar terdepan. Negara yang ingin maju dan berhasil perlu menempatkan pendidikan sebagai agenda utama pembangunan. Permasalahan yang timbul bahwa yang membuat suatu bangsa maju bukan karena

keberlimpahan sumber daya alam atau lamanya suatu bangsa negara berdiri, tetapi lebih pada kualitas manusianya. Sementara itu, kualitas manusia hanya dapat dihasilkan melalui pendidikan yang memberdayakan, sebuah proses pendidikan yang membuat individu menjadi mandiri, mampu berpikir kritis, inovatif, berkarakter dan berdaya saing. Sehingga dirasa sangat perlu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dengan pendidikan di perguruan tinggi.

Kutipan dari Kurniawati mengatakan dalam buku teori-teori pendidikan bahwa aspek-aspek yang biasanya paling dipertimbangkan dalam pendidikan antara lain: kesadaran, pencerahan, pemberdayaan, perubahan perilaku. Pendidikan dalam arti yang luas meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah (Soegarda 1982: 257).

Pendidikan tinggi merupakan tumpuan akhir seluruh jenjang pendidikan dan sebagai wahana pembentukan sarjana yang memiliki budi pekerti luhur, melangsungkan nilai-nilai kebudayaan, memajukan kehidupan dan membentuk satria pinandita. Menurut (Mohammad Ali, 2009: 177) Perguruan tinggi memiliki tiga fungsi utama, yaitu: a. Pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*), b. Pengembangan sains dan teknologi, c. Sebagai agen perubahan sosial.

Kurikulum menjadi aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional dan menjadi komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Secara sederhana, kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum menjadi urgen karena merupakan peta jalan menuju harapan, yakni manusia Indonesia yang hendak kita wujudkan. Perlu disadari bahwa tantangan generasi berubah dari waktu ke waktu, dan karena itu pula, kurikulum tentu perlu menyesuaikan dengan kebutuhan jamannya.

Kurikulum yang diterapkan di perguruan tinggi berperan penting dalam proses mewujudkannya generasi yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan keahlian dalam menghadapi tantangan global di abad 21. Mengingat kurikulum ini suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dikembangkan dengan meliputi komponen-komponen kurikulum yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, yaitu komponen: tujuan, bahan, metode, peserta didik, pendidik, media, lingkungan, sumber belajar, dan lain lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut harus dikembangkan agar tujuan pendidikan dapat dicapai sebagaimana mestinya (Idi, 2014:14).

Penjelasan mengenai pengembangan kurikulum di pertegas Schubert (1986) menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum sangat penting, karena akan sangat menentukan jenis dan kualitas pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkan seseorang dapat mencapai kehidupan dan penghidupan yang baik. Hal tersebut senada dengan pendapat Bobbit (1918), bahwa kurikulum harus dikembangkan dan disesuaikan dengan kecakapan-kecakapan yang harus dicapai. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 35 ayat 2 dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Perpres No. 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI), dan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, memberikan pesan kuat bahwa pendidikan tinggi harus mampu melahirkan manusia Indonesia yang cakap, berkarakter, dan berdaya saing. Selain itu, pendidikan tinggi harus mampu memberdayakan mahasiswa menjadi manusia terdidik (*educated person*) yang berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Manusia Indonesia juga harus mampu sejajar dan bersaing dengan warga bangsa yang lain. Kualifikasi manusia Indonesia

seperti itulah yang diharapkan bisa terbentuk melalui proses pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terkait dengan keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. Keterampilan pokok ada lima yang perlu dimiliki, yakni keterampilan beradaptasi, berkomunikasi kompleks, memecahkan masalah nonrutin, manajemen diri, dan berpikir sistem (*National Academy of Sciences*, 2011).

KKNI sendiri merupakan kerangka acuan minimal yang menjadi ukuran, pengakuan penjenjangan pendidikan yang dilakukan. KKNI juga disebut sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Perspektif KKNI, setiap program studi diharuskan memperjelas “profil lulusan” yang diharapkan melalui kegiatan pelacakan studi, studi kelayakan dan analisis kebutuhan di masyarakat. Profil lulusan mencerminkan kemampuan minimal yang harus dikuasai mahasiswa setelah lulus yang merujuk pada empat aspek kebutuhan (1) sikap (*attitude*), (2) bidang kemampuan kerja, (3) pengetahuan, dan (4) manajerial dan tanggung jawab. Keempat kemampuan kemudian harus dijabarkan ke dalam sebuah capaian pembelajaran (*learning outcome*) pada setiap mata kuliah di program studi. Sehingga nantinya, semua perencanaan pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Semester (RPS) harus didasarkan pada capaian pembelajaran (*Learning Outcome*) yang sesuai dengan kebutuhan profil lulusan.

Level yang sesuai dengan program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu level 6 KKNI. Pada level ini diharapkan lulusan: 1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; 2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu

memformulasikan penyelesaian masalah prosedur; 3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; 4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Salah satu Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan (LPTK) di Indonesia yaitu STKIP PGRI Tulungagung program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah menerapkan kurikulum berbasis KKNI di daerah Jawa Timur. LPTK membuat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Implementasi KKNI yang sudah diterapkan dalam perguruan tinggi dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), mengingat implementasi ini menjadi acuan untuk pembangunan sumber daya manusia dan tenaga kerja Indonesia. Selain itu kualifikasi tidak hanya mengacu pada pendidikan formal, tetapi juga pelatihan yang didapat di luar pendidikan formal, pembelajaran mandiri, dan pengalaman kerja sehingga judul tesis **“Implementasi Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Dalam Meningkatkan Civic Skills Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP PGRI Tulungagung”**.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian seperti yang tertuang di dalam rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana kurikulum Prodi PPKn di STKIP PGRI Tulungagung sudahkah sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan *civic skills* mahasiswa prodi PPKn?
2. Bagaimana Perencanaan dan Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kurikulum berbasis KKNI dalam

Dwi Agustina Rahayu, 2019

IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) DALAM MENINGKATKAN CIVIC SKILLS PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI STKIP PGRI TULUNGAGUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

meningkatkan *civic skills* mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP PGRI Tulungagung ?

3. Bagaimana tingkat kemampuan *civic skills* mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP PGRI Tulungagung dalam menggunakan kurikulum berbasis KKNI ?
4. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan dosen PKn dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan *civic skills* mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP PGRI Tulungagung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan **“Implementasi Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Dalam Meningkatkan *Civic Skills* Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP PGRI Tulungagung”**

1.3.2 Tujuan khusus

Berdasarkan tujuan umum diatas, peneliti merumuskan tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk mendiskripsikan:

1. Untuk mengetahui tentang kurikulum Prodi PPKn di STKIP PGRI Tulungagung sudahkah sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan *civic skills* mahasiswa prodi PPKn.
2. Untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan *civic skills* pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP PGRI Tulungagung.
3. Untuk mengidentifikasi Bagaimana tingkat kemampuan *civic skills* mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP PGRI Tulungagung dalam menggunakan kurikulum berbasis KKNI.

4. Untuk mengetahui kendala dan upaya kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan *civic skills* mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di STKIP PGRI Tulungagung.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui kajian yang dilakukan secara lebih mendalam agar memperoleh data dan sejumlah informasi guna untuk menjawab berbagai masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan keterampilan mahasiswa di Perguruan Tinggi, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menghasilkan temuan yang sangat aktual, terutama dalam pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran PKN yang mampu meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) mahasiswa.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yang meliputi :

a. Bagi Mahasiswa

Dapat memahami pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara utuh yang meliputi aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*) dan sikap (*disposition*), sehingga mahasiswa mampu mengkonstruksi pengetahuan tersebut menjadi perilaku atau watak dalam proses perkuliahan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Bagi Para Dosen

Penelitian ini dapat membantu mengembangkan pembelajaran PKN yang meliputi; perencanaan, proses pembelajaran, dan penilaian berdasarkan

kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) mahasiswa.

1.4.3 Manfaat Segi Kebijakan

Manfaat penelitian dari segi kebijakan adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam membuat kebijakan atau regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan pada kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) mahasiswa di STKIP PGRI Tulungagung .

1.4.4 Manfaat Segi Isu

Manfaat penelitian dari segi isu adalah sebagai berikut :

Penelitian ini sebagai sumber bagi dosen, mahasiswa Pkn, mengenai pembelajaran Pkn melalui kurikulum berbasis KKNI.

1. Melalui tulisan ini, penulis dan pembaca akan dapat memastikan sejauh mana pembentukan keterampilan kewarganegaraan melalui kurikulum berbasis KKNI.
2. Melalui tulisan ini, penulis dan pembaca akan dapat memastikan sejauh mana pembentukan keterampilan kewarganegaraan melalui kurikulum berbasis KKNI.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Dalam tesis ini terdiri atas lima bab, masing- masing bab tersebut meliputi:

Bab I Pendahuluan, merupakan rasional yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Isi dari bab ini meliputi: (a) Latar belakang penelitian, (b) Rumusan masalah penelitian, (c) Tujuan penelitian, (d) Manfaat penelitian, dan (e) Struktur organisasi tesis.

Bab II Kajian pustaka, merupakan gambaran berbagai konsep, generalisasi dan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Isi dari bab ini meliputi; (a) Kajian tentang kurikulum, (b) Kajian mengenai Pendidikan Perguruan Tinggi,

(c) Kajian tentang Pendidikan Kewarganegaraan, (d) Kajian mengenai pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, (e) Penelitian terdahulu, dan (f) Paradigma penelitian.

Bab III Metode Penelitian, merupakan penjelasan yang rinci mengenai metode penelitian yang digunakan. Isi dari bab ini meliputi; (a) Lokasi dan subjek penelitian, (b) Pendekatan dan metode penelitian, (c) Definisi operasional, (d) Penyusunan Instrumen, (e) Teknik pengumpulan data, (f) Teknik analisis data. (g) Isu etik, dan (h) Jadwal kegiatan penelitian atau penyusunan tesis.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, merupakan gambaran data yang diperoleh dari lapangan untuk kemudian dianalisis menggunakan berbagai teori yang relevan. Isi dari bab ini meliputi; (a) Gambaran umum lokasi penelitian, (b) Deskripsi hasil penelitian, (c) Analisis hasil penelitian.

Bab V Simpulan dan saran, merupakan jawaban dari aspek yang diteliti. Bab ini terdiri dari simpulan (umum dan khusus) serta saran.

Daftar Pustaka